



RINGKASAN

RINGKASAN

HUBUNGAN ANTARA RESTRUKTURISASI ORGANISASI DAN POLA COPING STRES PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR

DWI MARDIANA SUSILAWATI

Penyelenggaraan Otonomi Daerah ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kebijakan otonomi daerah dalam perspektif pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, membangun sistem pola karir yang kompetitif, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Salah satu respon dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya restrukturisasi organisasi di pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan restrukturisasi organisasi, beragam persoalan acapkali muncul sebagai fenomena yang sulit dihindarkan dari wacana *good governance* dalam birokrasi di Indonesia. Terlebih saat ini, fenomena penggabungan instansi pusat dengan daerah menjadi sebuah dinas/instansi baru di bawah naungan propinsi maupun daerah menjadi tataran praktis akan membawa perubahan suasana dan nuansa kinerja birokrasi di daerah dengan berbaurnya dua komunitas pegawai atau PNS (pusat dan daerah) yang boleh jadi mempunyai perbedaan kebiasaan dan karakteristik dalam melaksanakan tugas. Fenomena tersebut akan sangat berpengaruh pada sumber daya aparatur yaitu PNS sebagai pelaku dalam organisasi. Dengan adanya restrukturisasi organisasi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Konsekuensinya, cukup banyak PNS yang tidak mempunyai kedudukan atau kehilangan kesempatan kerja yaitu aparatur yang tidak memiliki kompetensi, pengetahuan dan sikap mental yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dan eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi sampel 262 orang pejabat dan staf Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dengan menggunakan teknik *stratified proportional sampling*. Variabel restrukturisasi organisasi dan tingkat stres diukur dengan menggunakan kuesioner skala Likert, sedangkan variabel pola *coping* stres diukur dengan menggunakan kuesioner skala-2.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square. Hasil pengujian hubungan antara restrukturisasi organisasi dengan tingkat stres, didapatkan nilai Chi Square = 90,056, dengan $p < 0,05$, berarti pengujian hubungan antara Restrukturisasi Organisasi dengan tingkat stres signifikan. Hal ini menunjukkan pandangan subyek terhadap restrukturisasi organisasi berkaitan dengan tingkat stres. Hasil pengujian hubungan antara restrukturisasi organisasi

dengan pola *coping* stres didapatkan nilai Chi Square adalah 8,474, dengan $p = 0,076$. Karena $p > 0,05$, maka berarti pengujian hubungan antara restrukturisasi organisasi dengan pola *coping* stres tidak signifikan. Hal ini menunjukkan pandangan subyek terhadap restrukturisasi organisasi tidak ada kaitannya dengan pola *coping* stres yang dilakukan. Subyek yang mempunyai pola *problem focused coping* memiliki pandangan yang sama terhadap restrukturisasi organisasi dengan subyek yang memiliki pola *emotion focused coping*. Hasil pengujian hubungan antara restrukturisasi organisasi, tingkat stres, dan pola *coping* didapatkan nilai Chi Square = 63,131, dengan $p < 0,05$ pada *problem focused coping*, maka berarti pengujian hubungan antara restrukturisasi organisasi dan tingkat stres pada pola *problem focused coping* signifikan. Pada pola *emotion focused coping*, didapatkan nilai Chi Square = 46,990, dengan $p < 0,05$. Artinya, pada responden dengan pola *emotion focused coping*, pandangan terhadap restrukturisasi organisasi berhubungan dengan tingkat stres.

